

BAB IV

BERBAGAI UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH MALAYSIA DALAM PROSES PERDAMAIAN DI THAILAND SELATAN

Konflik Thailand Selatan merupakan konflik yang berkepanjangan yang terjadi antara separatis di wilayah Thailand bagian selatan dengan pemerintah Thailand. Kaum separatis yang ada di wilayah selatan menyita perhatian banyak negara sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi pihak pemerintah Thailand, karena sampai sekarang konflik ini telah merugikan banyak pihak baik dibidang ekonomi, sosial, keamanan dan lain-lain. Bahkan sampai saat ini konflik yang berkepanjangan ini sudah memakan korban jiwa, lebih dari 6.500 orang harus meninggal dunia akibat konflik ini. Serta membuat masyarakat yang tinggal di wilayah selatan Thailand hidup dibawah tekanan dan kemiskinan yang diakibatkan situasi politik, ekonomi dan keamanan yang tidak stabil.

Malaysia yang merupakan negara yang secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah konflik Thailand Selatan merasa prihatin dengan konflik yang terjadi di wilayah Thailand Selatan ini. Hal ini disebabkan karena adanya rasa persaudaraan sebangsa dan seagama dengan masyarakat yang tinggal di Thailand Selatan. Belum lagi konflik ini memberikan dampak yang kurang baik untuk Malaysia, karena konflik Thailand Selatan membuat stabilitas wilayah Utara Malaysia dan kawasan Asia Tenggara menjadi terganggu. Konflik ini juga sempat membuat hubungan antara Malaysia dan

Thailand menegang yang disebabkan karena adanya adu argumen dan saling kecam antar kedua negara.

Melihat konflik yang berkepanjangan tersebut, Malaysia sebagai negara tetangga Thailand merasa ikut terdorong untuk membantu Thailand dalam menyelesaikan konflik di wilayah Thailand Selatan. Pada akhirnya Malaysia memetakan rangkaian upaya untuk mengakhiri ketegangan gerakan separatis di wilayah Thailand Selatan sebagai tindakan maupun usaha Malaysia yang berkedudukan sebagai fasilitator dalam konflik ini. Berbagai macam kunjungan dan upaya di tempuh demi terciptanya perdamaian di wilayah Thailand Selatan. Dalam menyelesaikan konflik di wilayah Thailand Selatan tentu diperlukan langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik tersebut. Menurut John Galtung, ada tiga tahap dalam penyelesaian konflik yaitu:

1. *Peace-making*

Adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan. Dikaitkan dengan kasus ini pihak – pihak yang bersengketa dipertemukan guna mendapat penyelesaian dengan cara damai. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang diambil. Pihak ketiga tersebut hanya menengahi apabila terjadi suasana yang memanas antara pihak bertikai yang sedang berunding.

2. *Peace-Keeping*

Adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral. Menurut definisi ini, untuk konflik yang terjadi antara pemerintah Thailand dengan separatis Thailand Selatan dapat dikesampingkan karena upaya perdamaian yang dilakukan berlangsung tanpa intervensi militer manapun. Hal ini sesuai dengan *ASEAN Way*, yaitu kebiasaan ASEAN dalam menyelesaikan persoalan dengan lebih mengedepankan upaya diplomasi, tekanan, dan pencegahan sedemikian rupa sehingga tanpa melibatkan aksi militer asing¹.

1. *Peace-building*

Adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses peacebuilding diharapkan *negative peace* (atau *the absence of violence*) berubah menjadi *positive peace* dimana masyarakat merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif.

Berdasarkan tahap-tahap penyelesaian konflik diatas, Malaysia sebagai negara yang berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik Thailand Selatan, telah melakukan tahap-tahap penyelesaian konflik seperti

¹Masilamani, Logan and Peterson Jimmy. 2014. *The "ASEAN Way": The Structural Underpinnings of Constructive Engagement*. <http://www.foreignpolicyjournal.com/2014/10/15/the-asean-way-the-structural-underpinnings-of-constructive-engagement/> Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2016 18.10 WIB

tahap *peace-making* dan *peace building* sebagai upaya Malaysia dalam proses perdamaian di Thailand Selatan.

A. Upaya *Peace-making* Malaysia Dalam Proses Perdamaian di Thailand Selatan.

Dalam tahap *peace-making* ini Malaysia sebagai negara yang berperan sebagai fasilitator berupaya untuk mempertemukan kedua belah pihak yang terlibat konflik yaitu pemerintah Thailand dan separatis Thailand Selatan untuk berunding menyelesaikan masalah yang ada yang bertujuan agar kedua belah pihak dapat menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan konflik yang ada. Adapun rangkaian upaya yang dilakukan Malaysia dalam upaya penyelesaian konflik di Thailand Selatan yaitu:

1. Upaya *peace-making* Malaysia Tahun 2005.

Pada tahun 2004 terdapat dua peristiwa yang melanda Thailand Selatan yaitu serangan terhadap Masjid Krue Se dan insiden kekerasan di Tak Bai di Narathiwat. Serangan terhadap Masjid Krue Se terjadi pada tanggal 28 April 2004 ketika militer Thailand menyerang Masjid Krue Se yang ada di Pattani dan membantai sekelompok orang yang diduga pemberontak. Korban tewas saat itu mencapai 37 orang yang berasal dari militan. Sementara itu, insiden kekerasan Tak Bai terjadi pada tanggal 25 Oktober 2004. Serangan dimulai ketika Distrik Tak Bai diserang oleh sekelompok orang. Beberapa orang dipenjarakan oleh polisi Thailand terkait serangan tersebut. Hal ini memicu demonstrasi besar-besaran masyarakat

Thailand Selatan di luar kantor polisi distrik. Polisi Thailand menanggapi demonstrasi dengan menempuh cara kekerasan.

Peristiwa tersebut menyebabkan terjadinya kerusuhan hingga menewaskan 86 orang di Thailand Selatan. Sejumlah 1300 orang ditangkap dan dibawa dari Tak Bai ke kamp militer di Pattani.²Enam orang meninggal di tempat kejadian dan 78 meninggal karena kekurangan oksigen ketika berada di dalam truk saat mereka dalam perjalanan menuju kamp militer. Kejadian ini menimbulkan kontroversi besar. Spekulasi bermunculan di antaranya tuduhan kekerasan yang berlebihan, metode yang terlalu keras, serta pelanggaran hak asasi manusia. Perdana Menteri Thaksin kemudian dituntut untuk segera memberikan pernyataan maaf, tetapi hal tersebut tidak dipenuhi³.

Puncak dari peristiwa ini terjadi pada tahun 2005 ketika pemerintah Thailand menerapkan status darurat militer di wilayah Thailand Selatan. Hal ini membuat masyarakat Thailand Selatan merasa khawatir dan ketakutan. Pada tanggal 30 Agustus 2005 131 masyarakat Muslim Thailand Selatan menyeberangi perbatasan dan masuk ke wilayah Kelantan, Malaysia untuk menghindari konflik di negaranya.

Atas peristiwa diatas, Dr. Tun Mahathir Muhammad pada tahun 2005 berdialog dengan kelompok separatis di pulau Langkawi. Dialog ini bertujuan untuk mencari jalan penyelesaian untuk perdamaian di Thailand

² Max L. Gross. 2007. *A Muslim Archipelago: Islam and Politics in Southeast Asia* (Washington DC:National Defense Intelligence College, Hal. 79.

³Gatra.com. 2004. *Raja Thailand: Pelunak Pendekatan di Selatan*. <http://arsip.gatra.com/2004-11-10/artikel.php?id=48691>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2016 pukul 11.40 WIB.

Selatan. Pada masa itu Dr. Tun Mahathir Muhammad memberikan pandangannya dan nasehat kepada kelompok separatis untuk perdamaian dan penyelesaian konflik di Thailand Selatan.⁴

Selang beberapa bulan pertemuan tersebut, pada bulan Oktober 2005 mantan Perdana Menteri Thailand Anand Panyarachun menemui Tun Mahathir Muhammad di Putrajaya untuk mendapatkan ide, pandangan dan perspektif Malaysia dalam menangani konflik di Thailand Selatan. Sebelumnya, atas undangan Anand Panyarachun, Tun Dr Mahathir Mohamad telah menemui Raja Bhumibol Adulyadej di Bangkok, Thailand. Baginda merestui peran Mahathir sebagai penengah dan merupakan tokoh yang berwibawa yang mewakili pemimpin Islam moderat. Anand Panyarachun merupakan ketua *National Reconciliation Council* (NRC) yang ditunjuk oleh Perdana Menteri Thaksin Shinawatra ketika itu. Tujuannya menemukan metode terbaik mendamaikan daerah mayoritas Islam di Yala, Narathiwat dan Pattani itu.

Antara isi draf rencana perdamaianya adalah kelompok separatis harus menggugurkan tuntutan mereka untuk merdeka, sebagai balasnya mereka diberikan pengampunan, pembangunan ekonomi yang lebih baik, alokasi dana yang lebih banyak untuk pembangunan di wilayah Thailand Selatan dan penggunaan bahasa Melayu di sekolah-sekolah yang berada di wilayah Thailand Selatan⁵.

⁴ John Fuston, "Malaysia and Thailand" *Southern Conflict: Reconciling Security and Ethnicity*, *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs* 32, No. 2. (2010), 248.

⁵ *Ibid.*

Pemerintah Thailand pula menginginkan gencatan senjata dan meminta kelompok separatis di wilayah tersebut untuk menyerahkan senjata mereka untuk mengakhiri kejadian teror seperti tembakan dan pengeboman yang sering terjadi Yala, Narathiwat dan Pattani itu. Pemerintah Thailand beranggapan bahwa tidak wajar memisahkan ketiga wilayah itu dari Thailand bahkan dengan mempertimbangkan latar belakang sejarah. Lebih baik, pihak yang berada di wilayah selatan berbaik-baik dengan Bangkok dan menuntut hak-hak mereka sebagai mana yang diatur konstitusi Thailand. Pihak keamanan di Thailand Selatan berusaha menemui tokoh besar karismatik yang dapat mempengaruhi kelompok militan di selatan Thailand Selatan. Antara tokoh ini adalah Sapae-ing Bazo, mantan guru besar Thamma Witthaya Islamic School di Yala dan Masae Useng. Mereka dari Barisan Revolusi Nasional (BRN). Dialog dan perundingan ini diharapkan akan menyelesaikan persoalan yang ada di Thailand Selatan untuk perdamaian.

2. Upaya *peace-making* Malaysia Tahun 2013

Atas permintaan resmi Thailand kepada Malaysia untuk dapat berperan sebagai fasilitator dan upaya mempertemukan pihak-pihak yang bertikai. Thailand meminta kepada Malaysia untuk memfasilitasi pembicaraan antara kelompok-kelompok Muslim Pattani yang beroperasi di Thailand maupun di Malaysia. Untuk tahap awal Malaysia berhasil mempertemukan kelompok Muslim Pattani untuk berbicara secara langsung

dengan pemerintah Thailand yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 28 Februari 2013 lalu.⁶

Kesepakatan ini ditandatangani di Malaysia bersama Barisan Revolusi Nasional(BRN), salah satu dari beberapa kelompok pemberontak yang beroperasi di Thailand Selatan. Perdana Menteri Yingluck Shinawatra bersama Perdana Menteri Malaysia Najib Razak kemudian menggelar pertemuan di Kuala Lumpur pada Kamis tanggal 28 Februari 2013. Pertemuan ini akan membahas pemberontakan di kawasan perbatasan kedua negara. Malaysia yang bertindak sebagai fasilitator dalam negosiasi antara pemerintah Thailand dengan pemberontak Muslim dan sepertinya akan menjadi tuan rumah dalam setiap pembicaraan damai antar kedua belah pihak.

Dokumen kesepakatan damai yang ditandatangani di Kuala Lumpur ini disebut sebagai awal dari sebuah "proses dialog". Kesepakatan ini menandakan sebuah terobosan besar dalam upaya untuk mengakhiri kekerasan yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Bagaimanapun, ini hanyalah sebuah langkah awal, mengingat kemungkinan perpecahan diantara para pemberontak dan keterbatasan para pemimpin pemberontak dalam mempengaruhi para pejuang mereka.

Sekretaris jenderal Badan Keamanan Nasional Thailand Paradorn Pattanatabutr, yang menandatangani kesepakatan ini mengatakan, "sebagai upaya lain dari pemerintah untuk mengatasi kerusuhan dan tidak berarti

⁶BBC.com. 2013. *Thailand Menyepakati Perdamaian dengan Pemberontak*. http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/02/130228_thailand_militan. Diakses Pada Tanggal 12 Januari 09.36 WIB

mengakhiri konflik secepatnya". Sementara Hassan Taib, perwakilan BRN yang menandatangani mengatakan bahwa "Terimakasih Allah, kami akan melakukan yang terbaik untuk memecahkan masalah. Kami akan meminta rakyat kami untuk bekerja sama mengatasi masalah."⁷

Dengan ditandatanganinya dokumen kesepakatan damai ini memberikan harapan kepada masing-masing pihak yang bertikai akan lahirnya perdamaian dan keadilan di wilayah Thailand Selatan.

Setelah perjanjian damai yang ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2013 yang lalu. Pihak Thailand dan pihak pemberontak sepakat untuk melakukan dialog damai lanjutan. Dialog damai tersebut dinamakan dialog damai KL (Kuala Lumpur) yang akan dilaksanakan di Kuala Lumpur Malaysia. Pada perundingan tersebut Malaysia berperan sebagai fasilitator. Dialog damai KL diselenggarakan pada tiga kali yaitu pada bulan Maret, April dan Juli.

Proses Dialog Damai KL tidak hanya diikuti secara cermat oleh masyarakat regional tapi juga dipantau pengamat hak asasi manusia internasional. Sejak ditandatangani konsensus umum antar pemerintah Thailand dan wakil para pejuang (BRN), kedua pihak duduk di meja rundingan sebanyak 3 kali (Maret, April dan Juli 2013). Di luar pertemuan formal itu, kedua belah pihak yaitu Delegasi Thailand yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional, Paradorn Pattanabutra

⁷*Ibid.*

sementara delegasi BRN diketuai Ustaz Hassan Taib beberapa kali bertemu dengan fasilitator dari Malaysia yaitu Dato Zamzamin.

Proses Dialog Damai KL mulai tampak ada sedikit keraguan setelah kedua belah pihak tidak bisa mematuhi kesepakatan untuk mengurangi kekerasan selama 40 hari bermula pada awal Ramadan 2013, yang dikenali dengan Inisiatif Damai Ramadan (*Ramadhan Peace Initiative*). Pada tahap awal, inisiatif yang dibuat sepihak oleh fasilitator ini dinilai cukup baik, tetapi akhirnya berantakan di tengah jalan. Hal ini disebabkan karena dalam inisiatif yang diumumkan pada 12 Juli 2013 itu disebutkan bahwa masing-masing pihak baik para pejuang bersenjata pembebasan Patani (BRN) dan tentara Thailand harus menahan diri dengan mengurangi tindak kekerasan. Menanggapi hasrat baik tersebut, BRN spontan menyambut dengan menyatakan, mereka tidak hanya akan mengurangi kekerasan bahkan akan berhenti sama sekali tembak menembak selama bulan Ramadan. Tentu saja dengan syarat, tentara pemerintah harus ditarik balik ke kamp masing-masing. Selama tempo tersebut tentara Thailand tidak boleh lagi berkeliaran di tengah-tengah masyarakat Melayu di wilayah Thailand Selatan.

Namun dalam minggu pertama saja aparat keamanan sudah menembak mati beberapa pemuda aktivis perjuangan. Hal ini disebabkan kerana terdapat beberapa kelemahan dalam inisiatif tersebut. Di antaranya tidak disebutkan secara jelas siapa yang akan memantau keadaan di lapangan selama ‘gencatan senjata’ tersebut. Masyarakat juga tidak menerima informasi yang tepat tentang apa yang disepakati. Seperti kalau

ada pelanggaran harus diadukan ke pihak mana. Karena tidak tahan diserang sepihak, akhirnya pejuang bersenjata membalas dengan menyerang anggota keamanan Thailand. Inisiatif Damai Ramadan pun bubar dengan masing-masing pihak saling menyalahkan.

Pada saat perundingan pihak BRN aktif mengajukan 5 Tuntutan sejak awal. Dimana tuntutan-tuntutan tersebut harus dijadikan agenda bahasan. Namun pihak Thailand merasa keberatan dengan tuntutan-tuntutan tersebut. Tuntutan yang dirasakan paling berat oleh pihak Thailand untuk menerima tuntutan awal itu di antaranya disebutkan bahwa Bangkok harus mengakui ketuanan bangsa Melayu di atas bumi Patani yang dijajah secara mutlak sejak 1902.

Yang tidak kalah penting, pihak pemberontak menginginkan proses dialog damai harus mendapat dukungan dari parlemen Thailand dan dialog damai harus menjadi salah satu agenda nasional. Juga harus mengangkat status Malaysia dari fasilitator menjadi sebagai mediator, bukan hanya sekadar fasilitator. Wakil-wakil badan atau organisasi internasional seperti Asean, OKI dan LSM asing harus dilibatkan sebagai pengamat. BRN harus diakui sebagai gerakan pembebasan. Dan Semua tersangka ditahan karena serangan teror harus dibebaskan dan penangkapa kepada warga Thailand Selatan yang dianggap sebagai pemberontak harus dihentikan. Semua yang diminta BRN itu ditolak mentah-mentah oleh Bangkok. Karena menurut pihak Thailand, yang akan dibicarakan dalam dialog tersebut adalah masalah internal negara Thailand, tidak harus melibatkan pihak luar.

Pada tanggal 2 September 2013 kembali diadakan perundingan antara pemerintah Thailand dan pemberontak Thailand Selatan di Ibu Kota Malaysia, Kuala Lumpur. Namun pembicaraan pada 2 September yang difasilitasi oleh Malaysia tersebut berakhir tanpa terobosan dan tanpa kesepakatan⁸.

3. Upaya *peace-making* Malaysia Tahun 2014.

Thawil Pliensri, sekretaris jenderal Dewan Keamanan Nasional (NSC) Thailand, pada tanggal 9 September 2014 berangkat ke Malaysia untuk membahas pengaturan putaran berikutnya mengenai perundingan perdamaian dengan gerakan pemberontakan Thailand Selatan dengan rekannya dari Malaysia. Thanwil dan pemerintah Malaysia akan membahas lebih jelas mengenai kerangka perundingan perdamaian sebelum pertemuan mendatang antara perdana menteri Thailand dan Perdana Menteri Malaysia.

Sebelum keberangkatannya, Thawil mengatakan bahwa Perdana Menteri Jenderal Prayuth Chan-Ocha menugaskan delegasinya untuk mengatur melanjutkan proses perdamaian dengan Malaysia, yang sepakat untuk mempertahankan perannya sebagai fasilitator. Dia akan membahas rincian masalah ini sebelum Jenderal Prayuth mengunjungi Malaysia dan menemui Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.

⁸ Ahram. 2016. *Thailand Akan Lanjutkan Pembicaraan Damai dengan Pejuang Muslim Patani*, <http://www.voa-islam.com/read/world-news/2016/12/08/47748/thailand-akan-lanjutkan-pembicaraan-damai-dengan-pejuang-muslim-patani/#sthash.otJundGp.dpuf>. Diakses pada tanggal 01 Januari 2017 pukul 20.28 WIB.

Sekjen NSC mengatakan daftar perunding akan jelas setelah pertemuan Perdana Menteri Prayuth dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak. Jenderal Prayuth mendukung perundingan berorientasi perdamaian, kata Thawil dan menyatakan siap untuk menciptakan pemahaman dengan semua kelompok, sehingga Malaysia bisa mengusulkan kelompok pemberontakan untuk bernegosiasi.

Thawil sudah mengusulkan perunding Thailand kepada Jenderal Prayuth yang kemudian akan memutuskan siapa yang akan memimpin delegasi Thailand pada pembicaraan perdamaian itu. “Situasi di provinsi perbatasan selatan membaik mengenai jumlah insiden kekerasan dan korban”, katanya. Namun, Wakil Kepala Angkatan Darat Jenderal Udomdej Sitabutr memerintahkan perlindungan dan pelayanan yang lebih baik bagi warga setempat karena pemberontak biasanya mencoba untuk memulai serangan pada masa tradisi Buddhis⁹.

Pada tanggal 01 Desember 2014 Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-Ocha melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Malaysia pasca kudeta militer. Perdana Menteri Prayuth Chan-Ocha bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia yaitu Najib Tun Razak. Pada pertemuan tersebut, pemimpin kedua negara melakukan perbincangan mengenai upaya proses perdamaian di Thailand Selatan.

⁹Beritasore.com. 2014. *Sekjen NSC Kunjungi Malaysia Untuk Rancang Perundingan Perdamaian*, <http://beritasore.com/2014/09/09/sekjen-nsc-kunjungi-malaysia-untuk-rancang-perundingan-perdamaian/>. Diakses pada tanggal 01 Januari 2017 pukul 20.19 WIB..

kunjungan resmi ini sebagai pertunjukan niat politik (*political will*) dari kedua negara dalam menjalankan upaya proses perdamaian yang pernah ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin tertinggi Thailand sebelumnya. Konflik Thailand Selatan menjadi isu dan topik utama dalam perbincangan antar kedua negara.

Selain itu, kedua negara juga membahas mengenai 'zona aman'. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kerugian dan kekerasan. Pembicaraan saat ini adalah pada tahap membangun kepercayaan dan zona keselamatan. Zona keselamatan akan menjadi daerah di mana pertempuran terkait perjuangan bersenjata adalah terlarang, menurut militer Thailand, tetapi rincian tentang zona tersebut belum dibuat jelas¹⁰.

Selama satu hari kunjungan Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha ke Malaysia, Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak mengajukan proposal untuk mengakhiri konflik puluhan tahun di provinsi-provinsi Selatan yang mayoritas penduduknya adalah Melayu Muslim.

Malaysia menguraikan tiga cabang strategi untuk membuat perdamaian stabil di Thailand Selatan yang dilanda konflik. "Kedua negara telah menyepakati ide yang diperdebatkan oleh Malaysia. Kami mengusulkan bahwa upaya perdamaian harus didekati dengan menggunakan tiga prinsip dasar," kata Razak dalam konferensi pers di Kuala Lumpur¹¹.

Perdana Menteri Malaysia mengatakan ini adalah periode bebas dari kekerasan; representasi dari semua pihak dalam perundingan damai; dan

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

semua pihak menyetujui daftar tuntutan yang akan diajukan kepada pemerintah Thailand. Sementara pada hari yang sama di empat provinsi Selatan lebih tiga puluh sabotase terjadi di serta terdapat puluhan kain spanduk yang bertuliskan kecaman kepada Junta Militer bekibar dimerata tempat dibagian provinsi Thailand Selatan, yaitu Pattani, Yala, Narathiwat dan sebagian daerah Songklha.

4. Upaya *peace-making* Malaysia Tahun 2016.

Pada tanggal 27 April 2016 Satu delegasi Thailand bertemu di Kuala Lumpur dengan konsultan yang mewakili kelompok separatis bersenjata Thailand Selatan dalam upaya untuk melanjutkan pembicaraan damai secara resmi, namun Pertemuan itu berakhir tanpa perkembangan selanjutnya¹².

Pada tanggal 10 September 2016 Perdana Menteri Malaysia dan Thailand berikrar di Bangkok bahwa pemerintah Thailand dan pemerintah Malaysia akan terus bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan konflik di Thailand Selatan serta mengukuhkan hubungan keamanan lintas-batas diperbatasan kedua negara. Pernyataan itu dibuat seminggu setelah Malaysia menjadi tuan rumah putaran terbaru perundingan tidak resmi antara pemerintah Thailand dan pemberontak Thailand Selatan, meskipun terjadinya serangkaian pengeboman mematikan di Thailand Selatan sejak

¹²Rashid, Razlan. 2016. *Pegawai Thai, Kumpulan Pemisah Selatan Bertemu di Malaysia*, <http://www.benarnews.org/malay/berita/my-th-peacetalk-160427-04272016180719.html>. Diakses pada tanggal 01 Januari 2017 pukul 22.08 WIB.

beberapa bulan lalu, yang diduga dilakukan oleh kelompok pemberontak di wilayah Thailand Selatan .

"Kepentingan kedua negara saling berkait. Stabilitas, dari segi keamanan dan dari segi kemakmuran, kepentingan dan masa depan kedua negara adalah tidak bisa dipisahkan," kata Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada sidang berita. "Dalam konteks keamanan, Malaysia terus siap untuk memainkan peran sebagai fasilitator dalam membantu dalam proses damai di Thailand Selatan. Saya sekali lagi menegaskan komitmen kami dan pemahaman kami bahwa ini adalah satu hal domestik Thailand dan akan meneruskannya berdasarkan kerangka kerja dan pedoman yang diberikan oleh pemerintah Thailand"katanya¹³.

"Kami telah sepakat dalam masalah keamanan, perdagangan, ekonomi perbatasan serta negosiasi damai bagi wilayah Selatan," kata Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha pada Benarnews.com. Kedua perdana menteri itu mengatakan mereka setuju bahwa negara mereka akan berbagi informasi intelijen dalam bekerjasama memerangi terorisme global dan kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia dan penyelundupan. Wilayah perbatasan antara Malaysia dan Thailand memang dikenal sebagai daerah yang banyakdipenuhi oleh aktivitas kriminal, dan pemberontak Thailand Selatan sering keluar masuk melaluinya. Kedua Perdana Menteri setuju untuk bergerak maju dengan

¹³Kwankijsawet, Somchai. 2016. *Malaysia,Thailand Sahkan Lagi Komitmen Terhadap Proses Damai Selatan*, <http://www.benarnews.org/malay/berita/deep-south-09102016082010.html>. Diakses pada tanggal 01 Januari 2017 Pukul 22.23 WIB.

menjelajahi perencanaan bersama untuk membangun tembok atau pagar untuk mempertahankan perbatasan antar kedua negara¹⁴.

B. Upaya *Peace-building* Malaysia Dalam Proses Perdamaian di Thailand Selatan.

Pada tahap *peace-building* Malaysia berupaya melakukan kerjasama dengan pemerintah Thailand dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, pendidikan, Sosial dan Budaya. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di wilayah Thailand Selatan sekaligus sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan konflik yang ada di wilayah Thailand Selatan. Berbagai upaya *peace-building* yang dilakukan Malaysia dalam upaya proses perdamaian di Thailand Selatan diantaranya :

1. Upaya *peace-building* Malaysia Tahun 2007

Pada bulan Februari 2007 Perdana Menteri Malaysia yaitu Abdullah Ahmad Badawi mengunjungi Bangkok. Pihak Thailand dan Malaysia berusaha untuk memetakan konflik dan mendiskusikan penyebab konflik serta mengorganisir konflik. Dan pada akhirnya kedua negara sepakat bahwa kemiskinan menjadi faktor penyebab terjadinya pemberontakan. Selain itu pada pertemuan tersebut kedua negara sepakat untuk memperbaiki hubungan kerjasama ke arah yang lebih positif yang sempat merenggang di tahun 2005-2006.

Setelah Abdullah Ahmad Badawi mengunjungi Thailand pada bulan Februari 2007, dua bulan kemudian yaitu pada bulan April 2007 giliran

¹⁴*Ibid.*

Perdana Menteri Surayud Chulanont yang mengunjungi Malaysia. Kunjungan balasan tersebut ditujukan untuk memetakan konflik di Thailand Selatan serta kedua negara berupaya untuk mencari penyelesaian konflik Thailand Selatan.

Pada tanggal 21 Agustus 2007 terjadi kesepakatan antar kedua negara dengan terbentuknya *Memorandum of Understanding On Educational Cooperation Between The Government of The Kingdom of Thailand dan The Government of Malaysia*. MoU tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Malaysia yaitu Datuk Sri Hishammudin Tun Hussein dan Menteri Pendidikan Prof. Dr. Wichit Srisa-an dari perwakilan Thailand. MoU tersebut ditandatangani di Putrajaya pada tanggal 21 Agustus 2007.¹⁵

MoU yang telah disepakati oleh kedua negara tersebut berisi mengenai pendidikan dalam segala sektor, diperuntukkan bagi guru, murid, maupun institusi, pertukaran informasi, beasiswa, pertukaran pelajar, memberikan kurikulum Islamiyah dan lain-lain. Hal ini bertujuan demi terjadinya peningkatan pendidikan secara menyeluruh khususnya di wilayah Thailand Selatan. Kesepakatan yang telah dibentuk tersebut diupayakan agar seluruh penduduk yang tinggal di wilayah konflik Thailand Selatan dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Karena berdasarkan statistik provinsi-provinsi yang berada di wilayah Thailand Selatan seperti Pattani,

¹⁵Bic.moe.go.th. 2007, *Memorandum of Understanding On Educational Cooperation Between The Government of The Kingdom of Thailand dan The Government of Malaysia*. <http://www.bic.moe.go.th/thold/images/stories/MOU/MOU/th-malay-eng.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2017 Pukul 19.00 WIB.

Yala, Satun dan Narathiwat merupakan provinsi-provinsi dengan tingkat pendidikan terendah di Thailand. Hal ini membuat mereka sulit bersaing dengan penduduk yang tinggal di wilayah tengah dan utara Thailand. Dan diharapkan dengan lahir MoU ini akan meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Thailand Selatan.

2. Upaya *peace-building* Malaysia Tahun 2009.

Perdana Menteri baru Thailand yaitu Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva melakukan kunjungan ke Malaysia pada tanggal 08 Juni 2009. Abhisit Vejjajiva berkunjung ke Malaysia untuk melakukan pertemuan dengan Najib Tun Razak yang saat itu menjabat sebagai wakil Perdana Menteri Malaysia. Kedua negara pun sepakat untuk meningkatkan kerjasama mengatasi kekhawatiran di wilayah Thailand Selatan¹⁶.

Pemerintah Malaysia dan pemerintah Thailand dalam pertemuan tersebut bersepakat untuk memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk membantu mencari penyelesaian konflik. Selain itu Thailand dan Malaysia juga sepakat untuk bekerjasama dibawah naskah yang dikenal dengan Naskah Tiga E yakni pendidikan (*education*), pekerjaan (*employment*), dan kewirausahaan (*entrepreneurship*)¹⁷.

Pada tahun yang sama, diadakan pertemuan dalam rangka kerjasama antara Thailand dan Malaysia, sekaligus diadakan sidang komite strategi

¹⁶BeritaSore.com. 2009. *Malaysia-Thailand Kerjasama Tangani Thai Selatan*. <http://beritasore.com/2009/06-09-malaysia-thailand-kerja-sama-tangani-thai-selatan/>. Diakses pada tanggal 24 Desember 2016 pukul 23.46 WIB.

¹⁷ John Funston, "Malaysia and Thailand" *Southern Conflict: Reconciling Security and Ethnicity*, "Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs" 32, No. 2. (2010), 248.

pembangunan daerah perbatasan bersama. Kedua negara juga berusaha keras untuk menciptakan keadaan yang aman, dan menghindari konflik yang akan muncul antara Thailand dan Malaysia.¹⁸ Bahkan ketika terjadi ketegangan kedua negara sebisa mungkin untuk tetap melakukan kerjasama.

Pada kunjungan yang lain, Malaysia bersedia membantu Thailand untuk mengakhiri konflik yang terjadi di wilayah perbatasan tersebut. Pada saat itu, Menteri Luar Negeri Thailand yaitu Surapong Tovichakchaikul bertemu dengan Menteri Luar Negeri Malaysia yaitu Datuk Anifah bin Haji Anam. Kedua menteri luar negeri tersebut membahas mengenai penanganan pemberontakan di wilayah perbatasan. Dalam diskusinya tersebut, kedua pihak akan membentuk perjanjian baru yang nantinya dapat memfasilitasi dan mengatasi pergerakan warga di kedua perbatasan.¹⁹

Pada tanggal 10 Desember 2009, Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva dan Perdana Menteri Najib Tun Razak meresmikan jembatan persahabatan yang menghubungkan Bukit Bunga di Jeli, Kelantan dan Ban Buketa di Thailand. Pertemuan itu tidak hanya untuk memperkuat hubungan negara bertetangga tersebut tetapi juga merupakan komitmen pemerintah Thailand dan Malaysia yang bertujuan untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas di wilayah Thailand Selatan yang bergolak.

¹⁸SuaraMerdeka. 2005. *Thailand-Malaysia Berdamai*, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0511/23/int1.htm>. Diakses pada tanggal 24 Desember 2016 pukul 23.55 WIB.

¹⁹Southern Border Area News, *Malaysia Cooperates with Thailand on South Issues*, http://wbns.oas.psu.ac.th/shownews.php?news_id=110030. Diakses pada tanggal 31 Desember 2016.

Di bawah pimpinan Abhisit, pemerintah Thailand berusaha untuk membawa kembali perdamaian di wilayah tersebut. Aspirasi ini sudah tentu didukung dan ingin dibagikan oleh Malaysia. Jembatan Persahabatan yang dibuka pada 2007 dan diresmikan kemarin adalah tanda simbolis kepada harapan dan keinginan rakyat Thailand dan Malaysia untuk bekerja ke arah kesuksesan yang lebih besar di masa depan.

Biarpun ada ancaman serangan teroris di Narathiwat, sehari sebelum kunjungan bersejarah itu, ia tidak menggugat keyakinan Najib untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia pertama mengunjungi ke daerah bermasalah itu. Tujuan kunjungan Najib itu juga adalah untuk meninjau lebih dekat perkembangan di wilayah itu. Sebagai tetangga yang kadang kala terkena tempas pergolakan di selatan Thailand, Malaysia siap membantu mencari solusi. Konflik wilayah itu tidak bisa dibiarkan berkepanjangan. Wilayah mayoritas penduduk Islam itu harus dikembangkan dalam segala aspek ekonomi, sosial budaya dan politik.

Najib Tun Razak mengatakan bahwa, “apakah langkah Abhisit dilihat sebagai ke arah otonomi atau desentralisasi, itu tidak penting. Yang penting adalah niat pemerintah Thailand untuk mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi rakyatnya di selatan negara itu”²⁰. Sebab itu Malaysia siap membantu pemerintah Thailand untuk mengembalikan keamanan di selatan negara itu. Namun, penduduk Islam di wilayah itu juga harus bersedia

²⁰Ww1.Utusan.com. 2009. *Bantu Pulihkan Keamanan di Selatan Thailand*, http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2009&dt=1210&pub=Utusan_Malaysia&sec=Rencana&pg=re_03.htm. Diakses pada tanggal 01 Januari 2017 pukul 23.02 WIB.

menolak kekerasan, memberi kerjasama kepada pemerintah Thailand dan taat setia kepada negara dan raja mereka.

3. Upaya *peace-building* Malaysia Tahun 2016.

Pada tanggal 10 September 2016, Perdana Menteri Thailand Mengunjungi Malaysia untuk membicarakan upaya proses perdamaian di Thailand Selatan. Pada pertemuan tersebut dibicarakan mengenai solusi konflik untuk wilayah Thailand Selatan. Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat Thailand Selatan yaitu dengan memberikan pelatihan kejuruan baik dalam bidang pariwisata, otomotif dan perhotelan kepada anak-anak muda yang berada di wilayah Thailand Selatan²¹. Adanya transfer ilmu dengan mengirimkan guru-guru kejuruan ke wilayah Thailand Selatan untuk transfer ilmu serta melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Malaysia untuk mengadakan program pertukaran pelajar kejuruan. Selain itu adanya kerjasama antara pemerintah Malaysia dan Thailand untuk memberikan pengajaran agama dalam bidang akaedmik. Hal ini dilakukan dengan cara transfer ilmu dengan cara mengirim guru-guru agama yang ada di Thailand Selatan untuk dilatih di Malaysia untuk memperdalam ilmu agama dan kualitas pengajaran keagamaan, serta adanya pertukaran pelajar antar sekolah yang ada di Thailand Selatan dengan yang ada di Malaysia.

Najib mengatakan bahwa "Malaysia akan terus membantu dari segi pelatihan kejuruan untuk anak-anak muda di Thailand Selatan dan Perdana

²¹Kwankijsawet, Somchai. 2016. *Malaysia, Thailand Sahkan Lagi Komitmen Terhadap Proses Damai Selatan*, <http://www.benarnews.org/malay/berita/deep-south-09102016082010.html>. Diakses pada tanggal 01 Januari 2017 Pukul 22.23 WIB.

Menteri Prayuth telah meminta kami untuk membantu dalam hal sekolah-sekolah agama di Thailand Selatan sehingga mereka dapat belajar akademik dan subjek keagamaan”.²²

Sebagai sesama negara anggota ASEAN, Malaysia dan Thailand menginginkan adanya stabilitas politik dan keamanan di wilayah perbatasan di kedua negara tersebut. Wilayah Thailand Selatan dan Utara Malaysia merupakan wilayah basis dari Muslim Pattani yang secara tidak langsung akan juga mengganggu hubungan bilateral kedua negara tersebut jika tidak diselesaikan dengan baik. Seyogyanya kesepakatan perundingan antara Muslim Pattani dan Pemerintah Thailand yang akan membicarakan proses perdamaian akan menjadi sebuah kesepakatan bersejarah tidak saja bagi Muslim Pattani dan Pemerintah Thailand juga akan memiliki dampak bagi stabilitas ASEAN pada umumnya.

²²*Ibid.*